



Pemkot Makassar Siap Rehabilitasi Kantor Ombudsman Sulsel

Pemkot Makassar Siap Rehabilitasi Kantor Ombudsman Sulsel

■ Guna Menunjang Kinerja



KUNJUNGI OMBUDSMAN SULSEL. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto disambut Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar beserta jajaran, saat berkunjung ke Kantor Ombudsman Sulsel di Jalan Letjen Hertasning, Rabu (15/1/2025).

MAKASSAR, UPEKS—Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh dua program baru yang dihadirkan Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar. Hal itu disampaikan langsung Ramdhan saat menerima kunjungan Ketua PN Makassar, I Wayan Gede Rumega di kediaman pribadinya, Jl Amirullah, Selasa (14/1/2024).

MAKASSAR, UPEKS—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan kesiapannya untuk melakukan rehabilitasi terhadap kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel di Jalan Letjen Hertasning, Rabu (15/1/2025).

Kedatangannya disambut Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar beserta

jajaran.

Ia datang didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Zuhalsi Zubir.

Tiba di kantor eks Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar itu, Danny, sapaan Wali Kota Makassar, langsung meninjau setiap ruangan yang baru ditempati awal Desember 2024 lalu.

Melihat kondisi kantor yang dinilai masih perlu pemben-

han, ia pun memerintahkan Dinas PU untuk melakukan beberapa rehabilitasi skala kecil demi kelayakan gedung perkantoran.

"Kelayakannya dulu, nanti bicara dengan PU dan BPKAD," kata Danny.

Pembenahan ini perlu dilakukan guna untuk menunjang kerja-kerja Ombudsman ke depan. Sehingga dapat maksimal di dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, terkhusus pada lingkup Pemkot Makassar.

Apalagi, Ombudsman bertugas untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi.

"Kantor baru ini insyaallah menjadi berkah untuk membuat pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional," tutupnya. (rut/hms)